

LAPORAN DISKUSI “ISLAM DAN DEMOKRASI” JURNAL AKADEMIKA UMS

Dewi Candraningrum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Diskusi Islam dan Demokrasi diadakan pada 28 Februari 2009 dengan pembicara Adian Husaini dan Ahmad-Norma Permata. Dalam prakata pembukaan, **Dr. Aidul Fitriciada** menyampaikan bahwa diskusi ini merupakan diskusi yang dimaksudkan untuk memulai dan menghidupkan kembali Jurnal Akademika. Fitriciada menambahkan bahwa Akademika sesungguhnya sudah sejak tahun 1980-an telah terbit, dengan penggiat seperti Amien Rais dan beberapa tokoh besar lain. Kemudian memaparkan secara singkat sepek terjang jurnal ini sebagai berikut. Bahwa sejak tahun 2005 Jurnal Akademika tidak dapat terbit lagi karena tidak bisa diakreditasi berdasarkan sistem Dikti. Jurnal Akademika memiliki ciri khusus, yang tidak menginduk pada satu kajian ilmu pengetahuan, kemudian juga formatnya yang berbeda dengan format yang ditawarkan atau diharuskan oleh Dikti sehingga tidak bisa terakreditasi. Tetapi disadari bahwa Jurnal Akademika pernah menjadi kebanggaan UMS karena dilanggan oleh kurang lebih 20 Universitas di luar negeri. Sampai sekarang banyak kalangan, baik dari dalam dan luar Indonesia yang menyanyakannya. Berbeda dengan jurnal yang terakreditasi oleh Dikti,

Jurnal Akademika selalu bersandingan dengan diskusi. Diskusi selalu mengawali penerbitan sehingga tema-tema yang dihadirkan dalam Jurnal Akademika ini relatif lebih solid. Seperti satu tema tunggal yang bisa dieksplorasi dalam satu volume. Prakata ini kemudian dilanjutkan dengan diskusi yang dipandu oleh moderator, **M.Thoyibi**. Sebelumnya, Thoyibi memberikan paparan singkat bahwa setidaknya ada tiga hal yang bisa dipelajari pada kesempatan diskusi itu, yakni tentang Islam, tentang Demokrasi dan tentang 'dan' itu sendiri. “Apakah Islam dan Demokrasi itu dua entitas yang berkonflik. Atau Islam dan Demokrasi itu dua entitas yang kompatible? Dan mengapa tidak “Islam dan Demokrasi” dalam arti Islam yang demokratis atau “Demokrasi yang islami”, tambahannya.

Pernyataan singkat dari moderator ini kemudian dilanjutkan dengan presentasi dari **Adian Husaini**. Menurutnya, demokrasi merupakan tema besar, tema yang begitu banyak dimensinya. Kemudian Husaini mengisahkan pengalaman ketika masa awal-awal menjadi wartawan di harian Berita Buana. Dia masih ingat pada sebuah seminar di hotel Wisata Internasional di Jakarta, ditugasi untuk

meliput seminar tentang Demokrasi. Dan ketika itu sedang ramai buku Huntington tentang gelombang Demokratisasi ketiga. Karena dia wartawan, dia suka melihat hal yang aneh. Menurutnya, seminar itu membosankan, karena hampir semua pembicara merupakan wakil-wakil dari berbagai agama. “Mereka memberikan legitimasi dan memuji-muji Demokrasi, misalnya yang Hindu menyatakan bahwa demokrasi sesuai dengan agama mereka, kemudian dicarilah ayat-ayat dari kitab suci agama Hindu (Wedha), yang Kristen juga datang dan bilang Demokrasi itu cocok dengan agamanya, yang dari Islam banyak juga yang datang, dan menyatakan bahwa Demokrasi adalah Islam itu sendiri”, papar Husaini dengan berapi-api.

Husaini melanjutkan paparan kisahnya, dengan menceritakan bahwa, pada waktu itu, sebagai wartawan, dia ingin melaporkan seminar itu dengan cara yang berbeda dari koran Kompas. “Saya harus beda dong dengan Kompas. Masak saya beritanya bahwa Islam kompatibel dengan Demokrasi”!, tandasnya. Husaini, yang mantan wartawan tersebut, kemudian mengisahkan bahwa pada sore harinya dia mendengar satu pembicara yang mengkritik demokrasi, yaitu Jalaluddin Rakhmat. Sayang Husaini tidak mengungkapkan pemikiran Rakhmat karena kehilangan naskah presentasi itu. Berikut adalah paparan Husaini atas keberatan dan ketidaksetujuannya pada demokrasi. Demokrasi tidak kompatibel dengan Islam karena PBB adalah badan yang tidak demokratis. Yang diisi oleh

negara-negara Barat yang tidak demokratis. Terutama disebabkan oleh adanya hak veto. PBB memiliki struktur Aristokratis. Contoh keputusan Dewan Keamanan PBB. Husaini menambahkan bahwa Indonesia juga sama. Padahal, tandasnya, kenyataannya demokrasi itu bukan sesuatu yang, di Barat sendiri menjadi sesuatu yang mereka pegang betul. Selanjutnya, sistem demokrasi ini adalah sistem yang sudah sejak zaman Yunani banyak dikritik oleh para filosof, seperti Aristoteles dan Plato. “Demokrasi menghasilkan monyet jadi pemimpin. Demokrasi itu inhern dengan kezaliman. Dalam demokrasi ada kezaliman. Dan kezaliman itu harus ditiadakan, karena orang bodoh disamakan dengan orang pintar. Prof. Bambang Setiaji (Rektor UMS) itu dengan Ryan, jagal itu, sama suaranya, satu, sama. Ini kan dzalim!”, jelas Husaini.

Menurut Adian Husaini, orang yang memiliki hak memilih bukan sembarangan orang, dia harus memiliki ilmu; kalau dia tidak memiliki ilmu, jangan diberi hak pilih. Kemudian Husaini memberikan contoh orang-orang dari suku pedalaman, yang tidak memiliki ilmu dan kemampuan untuk memilih wakil rakyat. “Jadi bagaimana orang-orang yang nggak ngerti apa-apa disuruh milih. Untuk Indonesia yang segini luas akhirnya menjadi boros, dan dzalim juga karena untuk untuk pemilihan Gubernur Jawa Timur saja habis lebih dari 1 trilyun. Nanti setelah jadi juga belum tentu bisa menyelesaikan masalah. Padahal dana itu sangat diperlukan untuk yang lain. Kita

susah susah mencari dana untuk pendidikan, kesehatan dan untuk dana-dana yang lain. Akhirnya dana itu hanya untuk ongkos demokrasi”, tambahnya. Husaini menyimpulkan bahwa ongkos demokrasi itu sangat mahal. Husaini mengaku, “Saya sendiri belum meneliti, tapi saya dengar ada yang meneliti, bahwa tidak ada korelasi antara perkembangan Demokrasi dengan kemakmuran. Bahwa kalau negara menerapkan Demokrasi, otomatis makmur. Itu nggak ada!”. “Makanya Lie Kwan Yu kemaren mengatakan ‘I don’t need Democracy, I need strong Government. Strong and effective Government. Jadi saya nggak butuh Demokrasi, tapi yang saya perlukan adalah pemerintahan yang kuat, yang efektif, nah akhirnya Singapore menjadi seperti sekarang”, jelasnya. Adian Husaini, yang sedang mengambil studi doktoral di Malaysia, menambahkan, “Malaysia sulit juga disebut sebagai Negara Demokrasi. Sekarang aja baru, namun justru sekarang ini ketika pintu Demokrasi di buka di Malaysia, Melayu terancam, itu dilematis sekali!”. Karena demokrasi, hak-hak orang Melayu harus sama dengan hak-hak orang Cina. Menurut Husaini Demokrasi telah tidak menguntungkan orang Islam.

Husaini kemudian mengutip pendapat Hasby Ashidiqi, “Ada tiga hal dalam demokrasi yang ditolak oleh Islam, yakni pertama, konsep tentang dunia, karena kata dia demokrasi ini tujuannya dunia, dan tidak ada perspektif akhirat. Kedua adalah perspektif soal kewarganegaraan, karena negara sebagai nation state maka yang disebut sebagai warga

negara adalah yang tinggal di situ saja. Sedang Islam berbeda. Dalam Islam siapa saja yang muslim maka dia saudara. Kalau dia masuk ke sini maka dia masuk dalam persaudaraan Islam. Ketiga adalah hal yang seringkali banyak didiskusikan tentang masalah kedaulatan. Apakah kedaulatan rakyat itu mutlak atau tidak? Tentu ini dalam Islam tidak. Kedaulatan ada di tangan Allah”. Adian Husaini menyimpulkan presentasinya dengan mengungkapkan bahwa demokrasi tidak kompatibel dengan Islam. Dan Umat Islam harus mampu mewujudkan sistem sendiri yang dapat mengakomodir kepentingan Umat Islam.

Presentasi kedua disampaikan oleh **Dr. Phil. Ahmad-Norma Permata**. Permata menyampaikan pada pengantarnya, “Jadi yang disampaikan oleh Bapak Adian tadi adalah potret buruk dari Demokrasi. Dan itu memang harus kita terima, bahwa demokrasi memang memiliki banyak kekurangan, banyak kelemahan, banyak kebobrokan dan mungkin banyak kejahatan disana. Tetapi saya ingin menunjukkan bahwa wajah demokrasi tidak hanya itu saja. Tetapi ada sisi lain yang juga kita perlu tahu”. Paparan Permata ini diberi judul “Islam dan praktik demokrasi di Indonesia”. Presentasinya merujuk pada praktik empirik dan bukan pada konsep-konsep demokrasi. “Terkait tentang wacana Islam dan Demokrasi. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Bapak Adian, ada beberapa tokoh internasional terkemuka dan punya pengaruh sangat besar yang mendengung-dengungkan seolah-olah

Islam itu tidak cocok dengan Demokrasi, bahwa Demokrasi itu tidak cocok dengan Islam. Dunia Islam adalah tanah tandus bagi Demokrasi. Karena Islam sering diidentikkan dengan Timur Tengah dan Islam juga identik dengan Arab. Apa yang Arab dianggap Islam, dan apa yang Islam dianggap seperti apa yang ada di Timur Tengah” Demikian juga sebaliknya dengan apa yang terjadi di Barat. Permata menceritakan pengalamannya selama lima tahun hidup di Barat. “Kalau melihat media massa, TV atau baca koran, konotasi orang kalau mendengar kata Islam itu seperti Timur Tengah dan Arab. Sehingga embel-embel situasi lain, yang di Timur Tengah, misalnya pemerintahan yang otoriter, diskriminatif terhadap minoritas, tradisi kekerasan itu dianggap sebagai tradisi Islam. Padahal sebenarnya itu tradisi Timur Tengah. Jadi kesalahan mengidentikkan Islam dengan timur tengah itu yang menjadi salah satu kunci mengapa demokrasi itu tidak bisa tumbuh di tanah Islam. Padahal kalau kita lihat sejarah di Indonesia, bukan hanya nilai demokrasi tetapi juga praktik demokrasi itu sudah akrab. Muslim di Indonesia itu sudah akrab dengan demokrasi sejak awal abad XX”, paparnya.

Ahmad-Norma Permata menyampaikan bahwa inti Demokrasi adalah pemerintahan yang berdasarkan pada kehendak yang diperintah. Arah pemerintahan yang mempertimbangkan aspirasi yang diperintah adalah inti dari demokrasi. Tapi kemudian karena demokrasi itu berkembang di berbagai negara, yang

tingkat peradaban, ekonomi, sosial dan budayanya berbeda-beda dan beragam, maka demokrasi juga beragam. Tandasnya, bahwa, secara sederhana, “Salah jika kemudian menganggap demokrasi itu identik dengan barat. Kalau kronologisme, iya. Kronologisnya, demokrasi tumbuh dari barat. Karena sebenarnya, demokrasi itu tumbuh dari masyarakat modern. Modernisasi sosial berasal dari industrialisasi di barat, maka demokrasi muncul di barat. Tetapi ada beberapa generasi dari demokrasi. Kalau kita lihat buku-buku mainstream dari buku-buku tentang sejarah demokrasi, paling tua adalah Eropa Barat dan Amerika Utara pada abad-abad 18. Kemudian abad 20 muncul di Eropa Selatan. Jadi Spanyol dan Portugal mencapai demokratisasi baru awal tahun 1960-1970-an. Kemudian Eropa Selatan dan Eropa Timur itu generasi kedua. Generasi ketiga adalah Amerika Latin, akhir tahun 1970-an dan awal tahun 1980-an. Sedang generasi keempat adalah Eropa Timur akhir tahun 1980-an dan awal tahun 1990-an. Generasi kelima adalah Asia tahun 1990-an. Dan generasi terakhir adalah Afrika. Karena Afrika saat ini belum pada proses demokratisasi namun masih pada proses konflik-resolusi dan memang tahapannya memang begitu”.

Permata menyanggah pernyataan Adian Husaini bahwa demokrasi tidak identik pada negara tertentu, budaya tertentu, agama tertentu, suku tertentu dan geografis tertentu; karena inti demokrasi adalah pemerintahan yang mempertimbangkan aspirasi dari yang diperintah; dapat terjadi dimana

saja, bisa dilakukan oleh orang dari agama manapun dan bisa dilakukan oleh orang dari etnis manapun. Kemudian Permata memaparkan tujuan demokrasi dengan menggunakan parameter Juan Linz dan Alfred Stephan. Disebutkan ada lima. Pertama, politik yang stabil dan tanpa kekerasan. Kedua, birokrasi yang impersonal dan efektif. Ketiga, hukum yang tegak dan indiskriminatif. Keempat, ekonomi yang makmur dan berkeadilan. Dan kelima, masyarakat yang madani atau Civil Society. Kemudian melanjutkan paparannya secara detail: “Saya akan merinci point-point ini. Politik yang stabil dan tanpa kekerasan. Ada satu contoh sederhana yang ingin saya bagi dengan kawan-kawan. Sebuah penglihatan sederhana yang mungkin selama ini kita luput. Mari kita lihat, negara muslim mana, yang punya mantan kepala negara yang masih hidup. Ini contoh sederhana, tetapi nantinya akan menjadi penting. Indonesia, kita punya, masih ada Gus Dur, masih ada Mega, Habibi. Malaysia ada, Pakistan ada. Agak ke barat sedikit dari Pakistan adalah Timur Tengah. Kira-kira negara mana yang memiliki kepala negara yang masih hidup. Hanya ada satu negara, Iran, kenapa? Karena di Timur Tengah, tradisi *political succession* (pergantian kepemimpinan politik) itu ada dua jenis: pertama, ditunggu pemimpin ini sampai mati; kedua, kalau rakyat tidak tahan, dan pemimpin ini tidak mati-mati, maka dibunuh. Coba kita bayangkan, seandainya, yang terjadi di Indonesia pada sepuluh tahun yang lalu hanya ada dua pilihan itu, maka apa yang akan

terjadi di negeri ini? Pasti akan terjadi kekacauan yang akan memakan biaya politik yang sangat tinggi. Jadi, proses demokrasi adalah upaya untuk meminimalisir biaya politik”.

Pernyataan tersebut digunakan untuk menyanggah lontaran Adian Husaini, bahwa demokrasi berbiaya tinggi. Permata menegaskan, “Jadi kalau Pak Adian menyebutkan biaya politik kita itu sangat tinggi, ya, itu memang betul. Karena dengan hitungan manapun kita ini memang sangat boros. Tetapi kalau kita bandingkan dengan, misalnya, apa yang terjadi dengan tetangga negara, Philipina atau Thailand, ketika tentara masih memiliki nafsu untuk turun ke jalan dengan membawa tank karena tidak puas dengan pemerintahan sipilnya. Hak tersebut tergolong boros. Jadi, kita memang sangat boros, tetapi alternatifnya jauh lebih boros. Karena yang kita boroskan itu sifatnya materi, tetapi kalau ketidakpuasan itu diekspresikan dengan pemberontakan, kekerasan, terutama oleh aktor yang masih mempunyai kekuasaan untuk memegang senjata, biayanya jauh lebih tinggi. Dan restorasinya akan memakan biaya dari generasi ke generasi. Kita lihat negara yang pernah mengalami perang tidak cukup dua generasi untuk menyembuhkannya, ada dendam, ada permusuhan yang berkepanjangan, dan itu akan sangat menguras energi”.

Kemudian, Ahmad-Norma Permata melanjutkan point berikutnya tentang birokrasi yang impersonal dan efektif. Sebuah birokrasi yang berlaku seperti mesin dan bersifat netral. Dia mencontohkan “Kalau saya seorang

teller bank, dan ibu saya mau menarik uang, maka saya masih menanyakan, bu KTPnya mana? Meskipun saya tahu itu ibu saya sendiri. Tetapi prosedur mensyaratkan saya sebagai bagian dari birokrasi yang impersonal, saya tidak mengenal itu ibu saya, tetapi peraturannya begini dan itu yang dilaksanakan”. Point tersebut berkaitan dengan point ketiga, hukum tegak dan indiskriminatif. “Jadi kalau ada sistem hukum yang mencoba mendiskriminasi, entah karena perbedaan agama, suku, ras atau status sosial, akan memancing diskriminasi dari pihak yang lain. Misalnya Perda Syariah yang ada di Sulawesi Selatan yang mewajibkan untuk memakai jilbab, sampai kemudian ada beberapa kantor Pemda yang memasang tulisan ‘kalau tidak berjilbab, tidak dilayani’. Kalau warganya itu bukan muslim, tentu itu menjadi sebuah persoalan. Sebagaimana masalah yang terjadi di Padang, ketika ada siswi-siswi yang non-muslim dipaksa memakai jilbab. Hal ini akan memancing pihak yang lain untuk melakukan pola serupa. Misalnya larangan berjilbab di Papua. Kita lihat, yang namanya politik itu selalu naik turun, adakalanya minoritas naik, dan adakalanya mayoritas menjadi lemah. Kalau aturan main itu kita mainkan dengan cara yang menantang dan memancing reaksi yang tidak enak terhadap pihak lawan, maka akan menimbulkan reaksi berantai yang akan membawa pada sistem politik yang tidak stabil”.

Permata, yang mendapatkan gelar Doktor Philosophie dari Jerman, melanjutkan paparan berikutnya

tentang ekonomi yang makmur dan berkeadilan. “Tadi Pak Adian menyebutkan ada beberapa penelitian yang mempertanyakan hubungan antara kemakmuran ekonomi dan demokrasi itu betul. Kalau, demokrasi itu dikaitkan dengan pemilu saja. Tetapi jika demokrasi itu dikaitkan dengan birokrasi yang impersonal dan efektif, maka keduanya memiliki korelasi yang erat. Seperti terbut dalam *Bertelsmann Index* yang mengeluarkan sebuah index tahunan tentang efektifitas pemerintahan di seluruh dunia. Ada tingkat *clean goverment*, ada tingkat *effecive negotiation*, ada tingkat kesulitan politik, dan ada tingkat pertumbuhan ekonomi. Index ini jauh lebih kompleks daripada index-nya Freedom House”, jelas Permata. Permata memberikan ilustrasi pada point tersebut, “Jadi di situ nanti kita lihat, misalnya Singapura. Dia secara politik, formal prosedural. Dia tidak demokratis karena hak-hak orang untuk bersuara itu dihambat. Demikian juga dengan Malaysia, tetapi efektifias goverment itu 10. Dus, Malaysia dan Singapura yang memiliki pemerintahan yang efektif telah pula menjalankan demokrasi. Karena pemerintahan yang efektif merupakan bagian dari demokrasi itu sendiri”.

Ahmad-Norma Permata kemudian memaparkan aspek yang terakhir, yaitu masyarakat madani, yang terkait dengan istilah madani atau masyarakat sipil. Menurutnya, “Hal ini merujuk pada dua hal, yang pertama *non-military*, sehingga konotasinya *non-violence*. Dan yang kedua adalah masyarakat yang terdiri dari berbagai

unsur namun hidup rukun. *Civil society, civic, citizen*, itulah yang kemudian oleh Anwar Ibrahim diterjemahkan dalam bentuk masyarakat madani. Karena pada masa Piagam Madinah atau pada masa Nabi, dibuat Piagam Madinah untuk mengakomodir keragaman penduduk Madinah menjadi satu kesatuan bersama”. Dia melanjutkan bahwa demokrasi itu bukan hanya milik barat, tetapi juga berkembang di Asia, Afrika, Eropa Timur, Eropa Selatan, Eropa Barat. Ada akumulasi *trial and refinement* dari kesalahan yang dilakukan oleh generasi sebelumnya. Jadi bukan merupakan teori mati, tetapi *best practises so far*, yang terbaik dari yang sudah dijalankan, mungkin ada yang lebih baik tetapi belum ada buktinya.

Permata memaparkan kembali, “Kalau kita berbicara sesuatu yang sifatnya empirik, ini buktinya. Yang pertama adalah partai politik. Mengapa partai politik? Karena Parpol memiliki keistimewaan. Dia adalah sebuah organisasi yang sebagian ada di masyarakat dan sebagian lagi ada di negara. Ini unik, jadi sebuah organisasi yang mampu menghubungkan secara langsung masyarakat dan pemerintahan adalah partai politik. Tentu Parpol ada bermacam-macam. Kalau kita lihat spesiesnya ada empat genus besar dan ada 16 spesies partai politik. Ada bermacam-macam, tetapi intinya partai politik berfungsi menjembatani aspirasi masyarakat kepada kebijakan negara dan juga mengontrol nanti. Dan juga ada pemilu. Mengapa *one man one vote*, karena berdasarkan praktik yang sudah ada, yang dijalani di Eropa, Asia

dan Amerika Latin, politik yang stabil dihasilkan oleh proses yang memberikan semua orang dewasa hak yang sama. Karena kembali lagi, kalau ada upaya untuk mendiskreditkan, karena dulu di Eropa pada abad-abad ke 18-19 hanya orang-orang yang *the have*, yang memiliki properti, yang punya hak milik, yang punya ladang, yang punya estate itu yang boleh milih. Tapi kemudian proses ini dianggap gagal karena tidak aspiratif terhadap orang miskin. Jadi, misalnya apakah betul, suara warga 70 juta warga NU itu bisa diwakili dua orang, Gus Dur dan Hasyim Muzadi? Saya kira tidak sederhana itu. Jadi kalau wakil-wakil itu dipilih secara selektif dan tidak melibatkan orang banyak maka akan menghasilkan kepemimpinan yang oligarkis. Jadi pemilu adalah proses untuk menetralsir pergolakan politik, karena itu, semua pihak harus diberi kesempatan yang setara. Dan yang terakhir adalah parlemen. Parlemen adalah perwujudan suara rakyat di negara, melalui partai politik. Tentu ada parlemen yang ideal dan ada juga parlemen yang tidak ideal. Tetapi pada prinsipnya ada institusi yang mengontrol jalannya pemerintahan karena prinsip demokrasi adalah pemerintahan yang sesuai dengan kehendak yang diperintah. Nah ini kita lihat bagaimana muslim demokrat itu sudah akrab dengan proses-proses demokrasi sejak awal abad 20”.

Permata kemudian memberikan ilustrasi bahwa Sarekat Islam merupakan titik awal bangsa Indonesia dalam mengartikulasikan identitas politiknya sebagai bangsa. Pada tahun 1916-1917 Belanda ketakutan, karena

sedang dilanda Perang Dunia pertama. Kemudian mereka membuka keran untuk partisipasi masyarakat dan menjadi moment yang berakar ketika *Volkstraad* dibentuk dan tokoh-tokoh Islam dari Sarekat Islam, terutama, banyak terlibat di dalamnya. Di era Orde Lama, sejarah Masyumi penting bagi stabilnya negara sebagai republik. Di era Orde Baru politisi Muslim menjaga nurani bangsa. Pada era itu, ada empat jalur yang ditempuh oleh politisi Muslim. Permata menjelaskan, “Yang pertama, menjadi oposisi loyal yang ada di PPP, kemudian ada yang mencoba masuk ke dalam rezim dan ingin membuat perubahan dari dalam. Ada Nurcholish Madjid, Akbar Tanjung, dan kawan-kawan dari HMI yang kemudian menguasai GOLKAR. Menariknya, akhir-akhir ini para pemikir, para peneliti dari luar negeri, yang seusia saya, sudah memasukkan

GOLKAR sebagai partai Muslim, bukan partai Islam tetapi partai Muslim karena dominasi HMI yang luar biasa. Dan ada juga yang ketiga yang mengambil jalur non politik, ada NU, ada Muhammadiyah, DDII, mereka berpolitik tetapi tidak lewat jalur formal dan yang terakhir adalah kelompok yang anti sistem yang kemudian masuk ke bawah tanah”. Permata menambahkan ilustrasi, “ Pada era reformasi, yang membidani, yang mendesain reformasi adalah aktor-aktor politik Muslim. Jadi, sangat tidak benar, jika dikatakan bahwa negara-negara berpenduduk Muslim adalah tanah tandus bagi Demokrasi. Menurut saya Indonesia adalah harapan bagi dunia Islam yang lebih demokratis”. Demikian, Ahmad-Norma Permata menutup presentasinya. Yang kemudian dilanjutkan dengan diskusi.